



LAGI-LAGI KPK TAK TAHAN TERSANGKA, KOK BISA?

Usai Sekretaris MA, Kini Kepala Bea Cukai Makassar

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang sudah hampir sebulan ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratisikasi tak kunjung ditahan. Preseden buruk pun makin menguat karena sebelumnya lembaga yang diketuai Firlil Bahuri ini juga tak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, tersangka suap pengurusan perkara. Perlakuan berbeda yang diberikan kepada para pejabat ini dikhawatirkan melemahkan KPK. Padahal Mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 21, penahanan dilakukan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Memenuhi syarat kan? Andhi diduga terlibat transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu. Sementara Hasbi, diduga menerima suap Rp 11,2 miliar.

(Baca Hal 11)

16 PEJABAT KEMENKEU YANG TERLIBAT TRANSAKSI MENCURIGAKAN:

1. Andhi Pramono nominal transaksi Rp 60,16 miliar (tersangka)
2. Eddi Setiadi nominal transaksi Rp 51,80 miliar (terpidana)
3. Istadi Prahasanto nominal transaksi Rp 3,99 miliar (terpidana)
4. Heru Sumarwanto Rp 3,99 miliar (terpidana)
5. Sukiman nominal transaksi Rp 15,61 miliar (terpidana)
6. Natan Pasomba nominal transaksi Rp 40 miliar (terpidana)
7. Suherlan nominal transaksi Rp 40 miliar (terpidana)
8. Yul Dirga nominal transaksi Rp 53,88 miliar (terpidana)
9. Hadi Sutrisno nominal transaksi Rp 2,76 triliun (terpidana)
10. Agus Susetyo nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
11. Aulia Imran Maghribi nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
12. Ryan Ahmad Rinas nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
13. Veronika Lindawati nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
14. Yulmanizar nominal transaksi Rp 3,22 triliun (terpidana)
15. Wawan Ridwan nominal transaksi Rp 3,22 triliun (terpidana)
16. Alfred Simanjuntak nominal transaksi Rp 1,27 triliun (terpidana).

Government (Hal.2)
Denny Minta
DPR Makzulkan
Presiden Jokowi

ANDHI PRAMONO

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar

HASBI HASAN

Sekretaris Mahkamah Agung (MA)



Denny Minta DPR Makzulkan Presiden Jokowi



Presiden Joko Widodo (membelakangi kamera) tampak menemui warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia, saat lawatannya, Rabu (7/6/2023). (Dok @jokowi)

JAKARTA-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menulis surat kepada pimpinan DPR mendorong proses pemakzulan (impeachment) kepada Presiden Jokowi. Denny menyebut ada dugaan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi.

"Saya berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana dalam surat yang dirilis Rabu (7/6/2023).

Pakar hukum tata negara itu menyebut tiga dugaan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi, yaitu:

Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024. "Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945," ucap Denny.

Dia mencontohkan lagi kasus Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Suharso, berdasarkan temuan Denny, dicopot dan dijerat kasus hukum setelah Suharso empat kali bertemu Anies Baswedan. Penguasa, ujar

Denny, juga mengarahkan kasus mana yang ditangani, mana yang disetop.

"Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres?" ujar Denny.

PDIP Singgung Pemilu 2009

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pun langsung merespons pernyataan Denny. Hasto pun mengajak Denny mengevaluasi Pemilu 2009. Menurutnya, saat itu, terjadi juga penggunaan instrumen negara untuk menaikkan suara parpol tertentu hingga 300 persen.

"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009. Ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300%. Kalau PDIP ini kan kemarin naiknya hanya 1%, berapa lah, 8%," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Itu pun dengan berbagai upaya kerja 5 tahun. Sehingga janganlah apa yang dulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana merupakan bagian dari rezim pemerintahan saat itu, kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasi," sambungnya.

Hasto menyebut Jokowi merupakan pemimpin negara yang sangat menjaga demokrasi. Bahkan, ia menuturkan Jokowi selalu berdialog dan tak memiliki dendam politik tertentu. "Pak Jokowi ini pemimpin

yang berdialog, yang tidak punya dendam politik sama dengan Ibu Megawati Soekarnoputri menge-depankan rekonsiliasi nasional," kata dia.

Karena itu, Hasto mengatakan sebaiknya Denny Indrayana tidak menakuti rakyat. Ia berharap Denny mengutamakan sikap kenegarawan. "Sehingga jangan kemudian menakuti rakyat. Setiap pemimpin apalagi akademisi itu harus punya

sikap kenegarawan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ucap Hasto.

Dia menambahkan, Ketum Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan bacapres Ganjar Pranowo memahami sistem bernegara dan mengedepankan jiwa kerakyatan. "Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Ganjar semua sosok demokrat, sosok yang memahami sistem politik berdasarkan Pancasila, sosok yang mengedepankan jiwa-jiwa kerakyatan, kebangsaan, kemanusiaan. Sehingga enggak ada menggunakan instrumen negara untuk menghadapi lawan politiknya. Maka di masa Pak Jokowi ini demokrasi kita betul-betul diangkat dengan sebaik-baiknya," tutup Hasto.

Terpisah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga memberi respon. Plt. Ketua Umum PPP Mardiono meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan dimakzulkan dari jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. "Kalau orang mengatakan pemakzulan dan sebagainya ya kalau saya jawabnya sih 'emang siapa lu?'," kata Mardiono di Kantor DPP PPP, Rabu (7/6/2023).

Menurut Mardiono, Denny tidak cukup berkompeten untuk melontarkan pernyataan demikian. Ia menegaskan bahwa proses pemakzulan atau impeachment itu juga membutuhkan proses yang panjang. "Lah tentu tidak, dan itu melalui proses yang panjang. Hari ini saya menengarai tidak ada alasan untuk masuk-masuk ke ruang itu dan itu saya yakini," ujar dia. (wid,rls,ist/dya)

TIGA SYARAT YANG HARUS DIPENUHI TERKAIT PEMAKZULAN PRESIDEN.

- **Pertama**, berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Dasar atau UUD 1945, presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Hal ini jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Kalau pun DPR setuju, usulan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh presiden. Kemungkinannya ada tiga, yakni ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR.
- **Kedua**, pemakzulan presiden bisa dilakukan jika adanya pelanggaran etika.
- **Ketiga**, pemakzulan karena alasan administratif. Contoh jika presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur di UUD 1945.

TIGA DUGAAN PELANGGARAN KONSTITUSI OLEH JOKOWI VERSI DENNY INDRAYANA

- Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.
- Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.
- Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024



KPU Tunggu 2 Putusan Penting Sistem Pemilu di MK, Kasasi Partai Prima di MA

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih menunggu dua putusan penting terkait Pemilu 2024. Pertama, keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi yang diajukan Partai Prima. Kedua soal sistem pemilu yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku tak ambil pusing. Menurut dia, segala upaya yang dilakukan pihak KPU sudah dilakukan dengan jalan terbaik. "KPU (juga) sudah menyatakan memori kasasi, kalau sudah itu, ikhtiar sudah dilakukan tinggal menunggu putusan," kata Hasyim.

Diketahui, Komisial Yudisial (KY) memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Liliek Prisbawono Adi selama lebih dari dua jam. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan putusan perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pemilu 2024 berdasarkan gugatan Partai Prima. Liliek hadir sebagai saksi pada pemanggilan kedua yang digelar Selasa (6/6) setelah sempat mangkir pada pemanggilan sebelumnya.

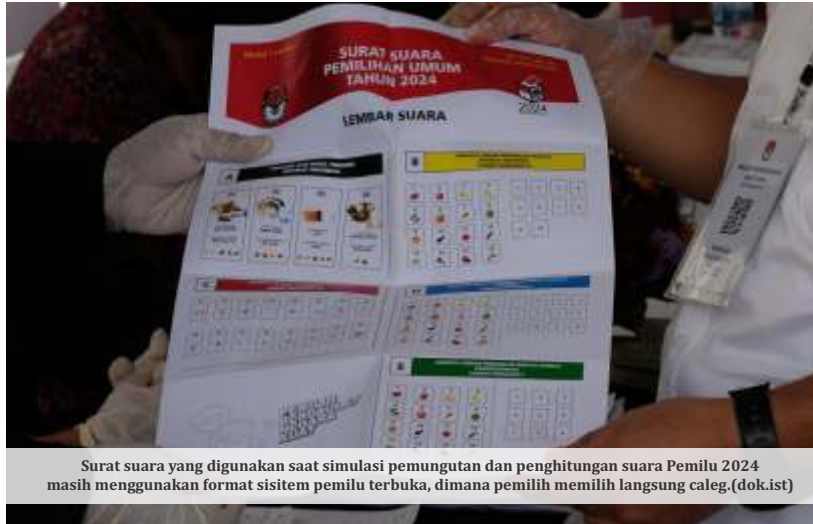
"Materi pemeriksaan bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan etik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari apakah ada dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim atau tidak," ujar Miko dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023). "Pemeriksaan berlangsung lebih dari dua jam," kata Miko.

Miko menjelaskan sampai saat ini, penggalian informasi dari Ketua PN Jakarta Pusat sudah cukup. Kendati demikian, Miko menyebut jika dibutuhkan, kemungkinan Ketua PN Jakarta Pusat dipanggil kembali untuk dimintai keterangan juga tetap terbuka.

Lebih lanjut, KY bakal melakukan pemanggilan ulang kepada Majelis hakim PN Jakarta Pusat. Majelis hakim PN Jakarta Pusat sempat mangkir dari pemanggilan Selasa (30/5/2023) lalu. "Harapannya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat menggunakan kesempatan di Komisi Yudisial untuk memberikan penjelasan," jelas Miko.

Miko mengklaim pihaknya bakal segera melakukan pemanggilan ulang terhadap majelis hakim PN Jakarta Pusat. Sebelumnya, KY menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku majelis hakim PN Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan tahapan Pemilu 2024. Laporan yang diterima KY pada 6 Maret 2023 itu dibuat oleh Kongres Pemuda Indonesia (KPI) yang diwakili advokat Pitra Romadoni dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat sebelumnya memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu dari awal. KPU dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dalam verifikasi faktual Partai Prima. Atas



Surat suara yang digunakan saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 masih menggunakan format sistem pemilu terbuka, dimana pemilih memilih langsung caleg. (dok.ist)

putusan itu, KPU pun mengajukan upaya banding.

Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencabut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, penundaan pemilu dibatalkan. Di sisi lain, Partai Prima mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya Ketua KPU Hasyim memastikan, KPU optimis dengan putusan MA akan senada dengan pengadilan tinggi. Hal itu berdasarkan peraturan saat ada pihak melakukan gugatan melalui jalur hukum perdata atau peradilan umum tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan ke pejabat publik, lembaga publik atau pemerintahan, semestinya tidak dapat diterima karena bukan kewenangan dari pengadilan umum.

"Itu (seharusnya) disampaikan melalui PTUN dan itu sudah menjadi sikap pengadilan tinggi kemarin," Hasyim menandasi.

MK Belum Jadwalkan Sidang Putusan

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) belum menjadwalkan sidang putusan sistem pemilu 2024 akan digelar. Keputusan MK soal sistem pemilu ini akan sangat berpengaruh

terhadap tahapan pemilu yang sudah berlangsung.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkap pihaknya tidak ingin berandai-andai soal putusan majelis hakim konstitusi. Menurutnya perkara gugatan sistem pemilu masih berjalan di MK. Fajar juga menegaskan nantinya keputusan MK terhadap sebuah perkara bersifat final dan mengikat. Apapun putusannya tentu harus dihormati.

Polemik MK yang akan memutuskan sistem pemilu mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. MK disebut tidak berwenang dalam menentukan sistem pemilu yang akan digunakan.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menuturkan bahwa sebaiknya MK menyerahkan sistem pemilu yang akan digunakan kepada pembentuk undang-undang. Hal senada juga ditegaskan oleh anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Taufik menjelaskan penentuan sistem pemilu merupakan ranah pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.

Sebelumnya, gaduh terjadi saat pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, memantik opini yang

menyasar kepada lembaga peradilan konstitusional tersebut dengan mengatakan bocoran bila sistem pemilu akan tertutup.

"Apa yang bocor kalau belum putus (sistem pemilu)?," kata Ketua MK. Anwar Usman kepada wartawan di Monumen Nasional Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Anwar meminta masyarakat menunggu putusan MK yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. "Liat saja apa putusan MK. Tunggu saja, Inshaallah dalam waktu dekat," tutupnya.

Berbagai desakan mencuat agar MK menolak gugatan uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika pun ada perubahan, MK diminta untuk menyerahkan perubahan sistem pemilu kepada pembentuk UU yakni DPR dan pemerintah. Delapan partai di DPR RI pun jelas menyatakan sikapnya mendukung sistem proporsional terbuka. Hanya PDIP yang ngotot agar pemilu digelar secara sistem proporsional tertutup.

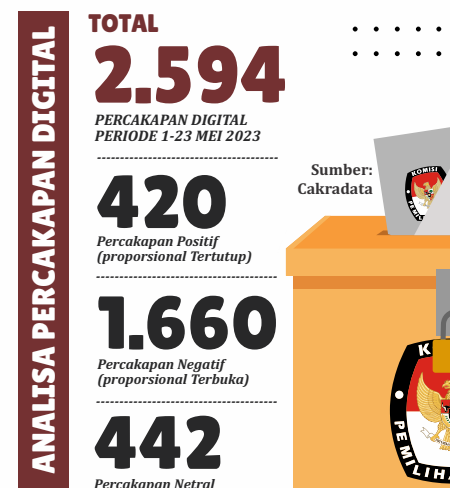
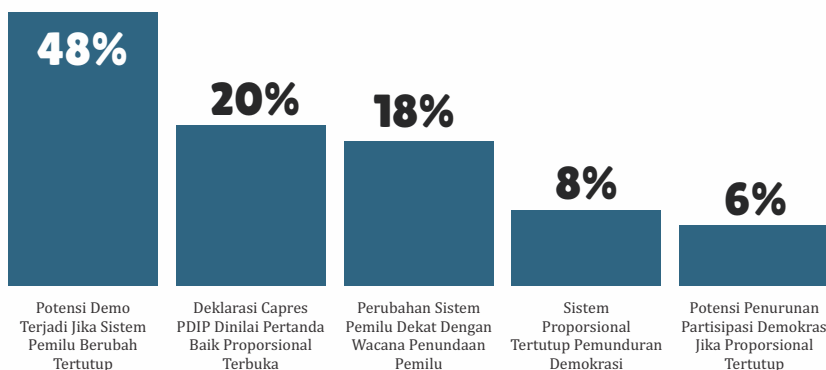
Tak hanya anggota dewan, berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat menginginkan sistem pemilu terbuka. Data tersebut diperoleh Februari 2022 dan Februari 2023.

"Pemilih punya hak siapa caleg yang lolos dengan sistem suara terbanyak. Secara umum, preferensi terhadap sistem proporsional terbuka mayoritas mutlak, sementara yang memilih proporsional tertutup tidak mengalami perubahan," jelas peneliti Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan data survei sistem pemilu.

Sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini bukanlah hal baru. Sejak 2008, berdasarkan keputusan MK, pemilu dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Jika MK mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, tidak hanya menjadi langkah mundur demokrasi di Tanah Air, namun mengganggu persiapan pemilu 2024 yang sudah di depan mata. (wid, ist,rls/dya)

NARASI WARGANET - PRO TERBUKA

Periode Pengambilan Data 1 - 23 Mei 2023 (Cakradata)



Nakes Kediri Luapkan Keberatan atas RUU Kesehatan



Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr Fauzan Adima

KEDIRI - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan terus mendapatkan respon dari para dokter dan tenaga kesehatan termasuk di Kota Kediri. Melalui organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan di Kota Kediri ikut menyoroti dan menyuarakan keberatan mereka atas RUU Kesehatan yang disebut pembahasannya terkesan tergesa-gesa dan substansinya perlu untuk dikoreksi.

Dalam merespon RUU Kesehatan itu, mereka menempuh jalur-jalur diskusi yang melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Ketua IDI Cabang Kota Kediri dr Badrul Munir menegaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan DPRD Kota Kediri untuk mereka bisa menyampaikan poin-poin keberatan itu.

"Kita sudah pernah menyampaikan ke DPRD Kota, sudah diterima PKS yang berjanji akan menyampaikan ke fraksinya. Sudah ke Sekretaris Daerah Kota Kediri juga, untuk bisa meneruskan poin-poin curhatan kami ke pemerintah pusat," kata dr Badrul Munir di Loji Kafe Kediri, dikutip dari beritajatim.com Rabu (7/6/2023)

Menurutnya, ada tiga poin atau isu penting mereka soroti pada pembahasan RUU Kesehatan. Hal, pertama adalah isu kemanusiaan, isu ketahanan dengan adanya upaya mendatangkan dokter dan tenaga kesehatan asing tanpa melalui seleksi kompetensi dan adaptasi.

Ketiga ada isu keamanan, menurut mereka, negara tidak memiliki privasi atau data kesehatan yang bisa dikirim ke luar negeri. Para tenaga kesehatan memahami sejatinya, menurut pemerintah lahirnya RUU Kesehatan ini mendukung transformasi kesehatan di Indonesia.

Perlu diketahui, DPR dan pemerintah sedang membahas adanya penolakan RUU Kesehatan ini. Pasal-pasal dalam RUU Kesehatan itu dianggap berpotensi menghambat

kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat untuk dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan.

Namun, sejumlah pasal yang dinilai problematik dan belum memenuhi harapan publik bisa dicarikan solusinya, melalui sejumlah diskusi yang konstruktif antar para pemangku kebijakan dan masyarakat.

"Penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law seyogyanya melibatkan dan menerima masukan dari Organisasi Profesi. Hal-hal yang masih menjadi permasalahan dapat didiskusikan tingkat daerah," tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr Fauzan Adima memberi apresiasi terhadap perjuangan tenaga kesehatan di Kota Kediri dalam upaya penolakan RUU Kesehatan yang bisa berdampak pada masyarakat.

"Kami Dinas Kesehatan Kota Kediri cukup mengapresiasi perjuangan-perjuangan nakes di Kota Kediri yang juga ikut berkontribusi dalam penolakan RUU Kesehatan ini, semoga semuanya ada jalan tengah, titik temu, pemerintah pusat mau mendengarkan suara organisasi profesi sehingga ini bisa dibahas lebih terbuka lagi, lebih detil lagi, sehingga terjadi kesimpulan yang bisa memberikan manfaat untuk semuanya terutama untuk negara dan bangsa," kata dr Fauzan.

dr Fauzan tidak ingin para nakes mengalami ketakutan untuk melonong karena lahirnya RUU Kesehatan itu. Ketakutan yang dimaksud adalah jika terjadi risiko dalam penanganan pasien, nakes bisa dikriminalisasi dan dipidana.

"Contoh di rumah sakit misalnya di IGD dokter akan melakukan penolongan emergency ternyata terjadi risiko yang ditimbulkan itu dianggap mall praktik. Ini yang dikhawatirkan nakes di Indonesia," jelasnya.

dr. Fauzan mengakui, kegalauan dari para tenaga kesehatan di Kota Kediri dengan lahirnya RUU Kesehatan itu. Tetapi dr Fauzan berharap ini tidak sampai terjadi aksi mogok dan mengimbau agar mereka tetap

mempertimbangkan keselamatan pasien.

"Kami antisipasi karena ini adalah masalah organisasi profesi pusat ya kalau sampai itu berdampak di Kediri, tentu kami antisipasi kami beri imbauan kepada para nakes kalau pun sampai terjadi mogok jangan sampai mengorbankan pelayanan kesehatan di Kota Kediri terutama penyelamatan pasien. Saya yakin nakes akan mempertimbangkan hal tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, berbagai aksi penolakan juga dilakukan para nakes dengan mendatangi gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). Berbagai organisasi profesi tenaga medis ini terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidang Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Massa berunjuk rasa untuk menolak pembahasan RUU Kesehatan di DPR. Menurut para pengunjuk rasa, RUU ini hanya akan membuat tenaga kesehatan di Republik Indonesia bersedih.

Seorang orator lainnya mengatakan bahwa keberadaan RUU Kesehatan membuktikan ada sesuatu yang terjadi di negeri ini. Pasalnya, tenaga kesehatan atau nakes merupakan kelompok profesi yang tidak pernah turun ke jalan, mereka sibuk mengurus pasien yang lebih membutuhkan. Tapi, kata orator itu, karena RUU ini mereka terpaksa harus turun ke jalan.

"Ada hal yang krusial terjadi di UU Ombibus Law, Seumur hidup kami tidak pernah melakukan aksi. Kita baru tiga kali melakukan aksi. Dan ini yang terbesar. Kami tidak akan pulang sebelum akhirnya diberhentikan pembahasan RUU Kesehatan," ujar sang orator.

Ia pun meminta agar pimpinan DPR menemui para peserta aksi yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia.

"RUU Kesehatan ini hanya membuat nakes di Indonesia menangis. Meneteskan air mata, Kami tidak pernah melakukan aksi tapi kali ini kami turun menuntut berhentikan RUU Kesehatan," kata seorang pengunjuk rasa lainnya yang berorasi.

Massa pun terlihat kompak mengenakan seragam putih bertuliskan Stop Pembahasan RUU Kesehatan.

Untuk diketahui, Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. RUU ini menuai polemik dan penentangan dari tenaga kesehatan. Sebab, RUU Kesehatan ini dinilai tidak adil bagi nakes.

IDI adalah salah satu organisasi profesi yang menentang pembahasan RUU Kesehatan ini. Eva Kurniati, dari IDI yang ikut berorasi di demo hari ini

mengatakan RUU Kesehatan ini merupakan RUU gaib. Ia menyayangkan pembahasan RUU ini yang dianggap tergesa-gesa dan tidak transparan.

"Bagaimana bisa berkhianat terhadap kami. Bagaimana bisa kalian melupakan kami. Dunia kesehatan, tanggung jawab kami. Kenapa kami tidak dilibatkan dalam RUU Kesehatan ini? Kenapa kami tidak dilibatkan? Ada apa?," katanya.

Menurut Eva, RUU Kesehatan ini dibuat untuk kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan yang pro rakyat, tapi kepentingan oligarki. "Karena semua ini dibuat tidak pro rakyat, dibuat untuk kepentingan sekelompok orang," ujarnya.

Ia pun menyerukan kepada massa aksi untuk terus menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan ini. (lut/dya)



Kami Dinas Kesehatan Kota Kediri cukup mengapresiasi perjuangan-perjuangan nakes di Kota Kediri yang juga ikut berkontribusi dalam penolakan RUU Kesehatan ini, semoga semuanya ada jalan tengah, titik temu, pemerintah pusat mau mendengarkan suara organisasi profesi sehingga ini bisa dibahas lebih terbuka lagi, lebih detil lagi, sehingga terjadi kesimpulan yang bisa memberikan manfaat untuk semuanya terutama untuk negara dan bangsa,"

dr Fauzan Adima

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri



Pertamina Raup Untung Rp 56,61 T, Tertinggi Sepanjang Sejarah



Rekor Tertinggi! PT Pertamina (Persero) Raih Laba Bersih Rp 56,61 Triliun pada 2022, Catatan Keuntungan Tertinggi dalam Sejarah Perusahaan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 56,61 triliun pada 2022. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tertinggi selama beroperasi.

"Alhamdulillah, 2022 bisa ditutup dengan kinerja tertinggi sepanjang sejarah Pertamina. Kita membukukan keuntungan US\$ 3,81 miliar ekuivalen Rp 56,61 triliun," kata Nicke Widyawati di Grha Pertamina, Jakarta, dikutip dari tempo.co, Rabu (7/6/2023).

Nicke menjelaskan bahwa pendapatan perseroan melonjak 48 persen menjadi US\$ 84,89 miliar. Angka tersebut sebanding dengan Rp 1.262,34 triliun atau sekitar sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nicke Widyawati menyampaikan pihaknya mengalokasikan sekitar USD 1,5 miliar untuk pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Angka ini lebih tinggi dari target yang dipatok oleh perseroan.

"Saya mengapresiasi TKDN dalam proses bisnis Pertamina. TKDN ini bertujuan meningkatkan industri dalam negeri, jadi dampak multiplier effectnya sangat besar," ujarnya pada Media Briefing Capaian Kinerja Pertamina, di Grha Pertamina, Jakarta, dikutip dari liputan6, Rabu (7/6/2023).

Tak hanya itu, produksi atau lifting migas juga mencatatkan pertumbuhan di tahun yang sama dengan 15 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Angkanya, mencapai 837 ribu barel

setara minyak bumi per hari (mboepd) dibanding lifting tahun lalu 728 mboepd.

Nicke menguraikan, bertumbuhnya kinerja upstream ini ditopang oleh kegiatan investasi dan pemanfaatan teknologi. Dimana dapat mencapai rasio kesuksesan dalam kegiatan pengeboran hulu dan memicu optimalisasi produksi. Produksi migas tahun ini naik 8 persen menjadi 967 mboepd.

"Di Hulu ada 65 blok dengan 27.000 sumur, kita monitor setiap hari produksinya, 27.000 ini kita lakukan gak mungkin kalau tanpa teknologi dan digitalisasi integrated hulu-hilir," ujarnya.

"2022 pengeboran sumur baru yang dilakukan oleh Pertamina group itu 700, 500 ada di Rokan ini gak mungkin perencanaanya tanpa digitalisasi karena untuk membuat itu tahapannya panjang sebelumnya, kalau tidak peralatan bisa tabrakan di lapangan, karena lapangan sumurnya juga berdekatan ini adalah hasil dari digitalisasi sehingga jadi penegas untuk menambah," beber Nicke.

Operational excellence juga terlihat pada usaha hilir. Ketersediaan (availability) dan akses (accessibility) terhadap produk BBM kepada masyarakat meningkat, dengan coverage nasional 98 persen melalui berbagai program seperti BBM Satu Harga, Pertashop dan One Village One Outlet (OVOO).

Nicke menambahkan, distribusi energi melalui program BBM Satu Harga dengan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah, tertinggal,

terdepan dan terluar (3T).

Hingga akhir 2022, program yang telah dimulai pada tahun 2017 dan bertujuan mendukung Pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan ini telah mencapai 413 titik lembaga penyalur. Khusus tahun 2022, terjadi penambahan dari 92 titik BBM Satu Harga di daerah 3T.

Penyaluran BBM yang mengedepankan prinsip ketersediaan dan keterjangkauan juga dikembangkan Pertamina melalui OVOO. Pengembangan outlet BBM ramah lingkungan yang dikenal dengan Pertamina Shop (Pertashop) ini terus berlanjut untuk menjangkau wilayah pedesaan yang jauh dari SPBU, dan di akhir tahun 2022 telah mencapai 6.152 Titik Pertashop.

Selain BBM ramah lingkungan, melalui program OVOO Pertamina juga membangun agen LPG untuk menyalurkan energi gas tabung. Hingga akhir 2022, jumlah outlet yang beroperasi sebanyak 64.277 titik. Program ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan tabung gas, khususnya LPG Bersubsidi.

Selanjutnya, Dalam rangka meningkatkan penggunaan gas alam di sektor rumah tangga, Pertamina juga memperluas sambungan gas rumah tangga, dimana di tahun 2022 telah dibangun 384.000 Sambungan Rumah Tangga (SRT) baru.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di pelosok Nusantara, Pertamina juga meningkatkan TKDN, dengan proporsi hingga 60 persen senilai USD 1,5 miliar. TKDN ini

melibatkan lebih dari 5.600 manufaktur lokal/nasional dan sekitar 82 ribu tenaga kerja lokal dan nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Di balik kesuksesannya, lantas seperti apa lika-liku BUMN ini berdiri? Mengutip laman resminya, Pertamina pertama kali didirikan dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) pada 10 Desember 1957. Pada 1960, PT Permina kemudian mengubah namanya kembali yakni Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, kembali berganti nama menjadi Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) pada 20 Agustus 1968.

Pemerintah mengatur peran Pertamina melalui UU No. 8 Tahun 1971. Perseroan berfokus pada kegiatan produksi, pengelolaan, dan pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri. Selanjutnya, regulasi diubah dengan UU No. 22 Tahun 2001 yang mempertegas posisi Pertamina dalam PSO (Public Service Obligation).

Mengacu PP No. 31 Tahun 2003 yang diteken pada 18 Juni 2003, PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara merevisi namanya menjadi PT Pertamina (Persero). Terhitung pada 10 Desember 2007, Pertamina mengadopsi visi "Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia". Pada 2011, visi pun diubah kembali menggunakan slogan "Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia".

Sementara terkait dengan pembangian jabatan dewan direksi, Pertamina merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No. S-690/MBU/11/2016 pada 24 November 2016, maka berlaku perubahan anggaran dasar terkait struktur dewan dan komisaris. Selain itu, dalam SK yang sama, tugas dan kewenangan Dewan Direksi serta Dewan Komisaris Pertamina diperjelas.

Tercatat sejak 2018, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi sub-holding Pertamina demi mewujudkan transformasi dari konsolidasi usaha gas dan implementasi peta perjalanan sektor migas.

Struktur Pertamina juga terus bertransformasi setelah ditetapkan sebagai Holding Company bidang energi sejak 12 Juni 2020. Pertamina memiliki enam anak usaha, yaitu PT Pertamina Hulu Energi, PT Perusahaan Gas Negara, PT Kilang Pertamina International, PT Pertamina Power Indonesia, PT Patra Niaga, dan PT Pertamina International Shipping. (lut/dya)



Putri Ariani

**Penyanyi Difabel Indonesia
yang Dapat Golden Buzzer**

NAMA Putri Ariani mendadak menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial lantaran berhasil mendapatkan Golden Buzzer di panggung America's Got Talent pada baru-baru ini.

Penyanyi asal Indonesia tersebut bahkan berhasil menyihir seluruh penonton dan bahkan keempat juri ajang pencarian bakat tersebut yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel dan Sofia Vergara dengan suara emas dan talentanya bermain piano.

Publik pun mulai penasaran dengan sosok Putri yang telah membawa nama Tanah Air ke kancah internasional dengan tampil di panggung America's Got Talent. Berikut ini profilnya. Scroll ke bawah untuk simak selengkapnya.

Profil Putri Ariani

Putri merupakan penyanyi yang berasal dari Kota Yogyakarta kelahiran bulan Desember 2005. Saat ini pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri itu sudah menginjak usia 17 tahun.

Meski memiliki keterbatasan fisik, namun tak membuat Putri kehilangan semangatnya dalam mengejar mimpi di dunia tarik suara.

Hal itu terbukti dari banyaknya prestasi yang telah ditorehkan oleh Putri di usianya yang terbilang masih sangat muda.

Namanya mulai dikenal saat menjadi juara di ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talents pada tahun

2014 lalu.

Suara emasnya berhasil memikat para juri dan publik lainnya sehingga dinyatakan layak mendapatkan kemenangan tersebut meski ada keterbatasan fisik yang dimilikinya.

Penyanyi muda tersebut juga diketahui pernah terpilih untuk membawakan Official Theme Songs Asian Para Games 2018 bersama para musisi Indonesia lainnya seperti Armand Maulana, Once, Vidi Aldiano, dan Maudy Ayunda pada tahun 2018 lalu.

Untuk meraih mimpinya sebagai seorang penyanyi besar, Putri juga menunjukkan bakatnya ke kancah internasional dengan mengikuti ajang America's Got Talent.

Penampilannya pun berhasil membuat juri dan penonton terpukau, bahkan hingga menangis haru.

Karena berhasil memukau para juri dan penonton, Putri Ariani akhirnya berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari salah satu juri, Simon Cowell. Golden Buzzer untuk maju ke babak live show America's Got Talent tanpa harus audisi lanjutan.

Penyanyi muda nan berbakat itu tampil membawakan lagu berjudul Loneliness. Lagu tersebut rupanya adalah ciptaan gadis berusia 17 tahun itu sendiri.

Kekurangan Putri Ariani sebagai penyandang tuna netra tidak menghalangi keinginannya untuk bersinar di atas panggung. Ia tampil dengan bermain piano yang

mengiringi suara merdunya.

Setelah membawakan lagu pertama, Putri Ariani sukses mendapatkan sambutan yang meriah dari para juri dan penonton.

Bahkan, Simon Cowell langsung naik ke atas panggung untuk menyapanya sekaligus meminta Putri menyanyikan lagu kedua.

"Saya sangat suka suaranya dan mau dia menyanyikan lagu ke dua," kata Simon Cowell, mengutip YouTube America's Got Talent, Rabu 7 Juni 2023.

Penampilan Putri Ariani berjalan mulus bahkan ia bisa mencapai nada-nada tinggi dengan sangat halus.

Maka dari itu, Putri langsung mendapatkan standing ovation dari keempat juri dan penonton yang datang.

Pada sesi komentar, para juri tampak tidak bisa berkata-kata dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap suara emas Putri.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sofia Vergara yang menyebut suara Putri terdengar bak malaikat.

"Kami semua terpesona. Suaramu seperti malaikat," kata Sofia Vergara.

Selain itu, Howie Mandel bahkan memuji Putri Ariani sebagai seorang malaikat yang turun dari langit dan tampil di atas panggung tersebut.

"Banyak orang tidak percaya pada malaikat tetapi saya pikir ada satu malaikat mendarat di panggung kita. Kamu adalah superstar," komentar



Howie Mandel.

Heidi Klum juga menilai penampilan Putri Ariani sebagai sesuatu yang sangat memukau. Ia jatuh cinta dengan kemampuan Putri saat membawakan lagu pertama.

"Suaramu sangat indah malam ini. Khususnya lagu pertamamu itu, perpindahan suara dari suara dada ke kepala," ujar Heidi Klum (ViVa)



SAATNYA LANSIA INDONESIA LEBIH BAHAGIA DI USIA SENJA

SETIAP 29 Mei Indonesia memperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) atau Hari Lansia.

Mengacu kepada Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang berstatus lansia ketika berusia 60 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 yang dilakukan Badan Pusat Statistik saat ini Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua karena dari 10 orang Indonesia, 1 diantaranya adalah lansia.

Bahkan pada 2045 diperkirakan 1 dari 5 penduduk Indonesia adalah lansia.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan berkelanjutan, saat ini jumlah lansia di Tanah Air terus meningkat. Ini disebabkan adanya perbaikan kehidupan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, sehingga angka kematian menurun dan angka harapan hidup terus bertambah.

Pada 2021 saja angka harapan hidup di Indonesia telah mencapai 71,57 tahun yang artinya setiap penduduk lahir pada 2021 berharap dapat hidup hingga usia 71-72 tahun.

Pada sisi lain, bertambahnya lansia menimbulkan beragam konsekuensi yang cukup kompleks. Sebab saat

lansia tidak lagi produktif keberadaannya menjelma menjadi bagian dari penduduk rentan.

Pada Maret 2022 sebanyak 10,48 persen penduduk Indonesia merupakan lansia dengan nilai rasio ketergantungan sebesar 16,09. Artinya satu lansia ditopang oleh 6 penduduk usia produktif.

Berdasarkan sebaran lansia terbanyak berada di Yogyakarta mencapai 16,69 persen dan terendah di Papua 5,02 persen.

Kemudian ada delapan provinsi yang mengalami aging population atau penuaan penduduk, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Dari seluruh lansia yang ada di Tanah Air saat ini sebanyak 64,59 persen berstatus kawin, 32,38 persen cerai mati, dan 7,25 persen tinggal sendirian.

Sebanyak 41,11 persen lansia kini tinggal di rumah tangga dengan kondisi ekonomi 40 persen terbawah, 37,17 persen ekonomi menengah dan hanya 20 persen tinggal di rumah tangga ekonomi atas.

Pada aspek kesehatan, mengacu pada Susenas 2022, satu dari lima lansia mengalami sakit seiring dengan bertambahnya usia dan menurunnya kondisi fisik.

Untuk mengakses layanan kesehatan, tercatat ada 44,79 persen

lansia yang telah menggunakan jaminan layanan kesehatan.

Dari data yang ada terungkap 82 persen lansia yang tinggal di rumah tangga ekonomi terbawah merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Pada sisi lain juga terungkap hampir seperempat lansia di Indonesia masih merokok, sehingga cukup berisiko terkena penyakit.

Dari sisi ketenagakerjaan juga terungkap tiga dari empat lansia merupakan pekerja yang rentan dan hingga Agustus 2022, sebanyak 52,55 persen lansia masih bekerja karena keharusan memenuhi kebutuhan hidup, hingga tidak ada jaminan pensiun.

Regulasi Pemerintah

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengidentifikasi ada tiga faktor menyebabkan lansia menjadi kelompok penduduk rentan, yaitu tidak lagi produktif secara ekonomi, persoalan kesehatan, dan kebutuhan pendamping sebagai pengasuh.

Sebenarnya Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi kondisi Indonesia yang tengah memasuki aging population.

Pada RPJMN 2020-2024 ditargetkan pada 2024 terjadi penambahan kawasan ramah lansia. Pemerintah, melalui Peraturan

Presiden nomor 8 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan disiapkan langkah untuk meningkatkan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu.

Selain itu juga dilakukan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia hingga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lansia.

Program tersebut harus mampu menjangkau lansia hingga ke pelosok, sehingga kondisi kesehatan dan sosial ekonomi mereka lebih terjamin.

Pada sisi lain, di sejumlah daerah, sebenarnya terdapat kearifan lokal dalam memperlakukan lansia dengan menempatkan posisi lansia sebagai sosok yang dihormati dan tempat meminta nasihat.

Tak hanya itu pandangan yang menyatakan penelantaran lansia adalah suatu hal yang tabu dapat menjadi benteng pengaman sosial bagi para lansia.

Dengan berpegang pada kearifan lokal itu, lansia akan tetap bisa berkontribusi dalam masyarakat dan terhindar dari status sebagai kelompok penduduk rentan.

Dengan demikian, lewat regulasi Pemerintah, kearifan lokal, serta budaya masyarakat diharapkan lansia bisa tetap hidup bahagia menapaki usia di ujung senja (Ant)



81 Persen iPhone Seluruh Dunia Gunakan iOS 16

iOS Apple dinilai selalu lebih cepat untuk menjangkau perangkat, dibandingkan Android yang notabene memiliki berbagai tingkat dan bermacam-macam pabrikan sehingga perlu disesuaikan dengan versi baru.

Mengutip laman GSM, iOS 16 yang pertama kali dirilis September lalu, telah digunakan di 81 persen iPhone di seluruh dunia.

Namun, jika membatasi penggunaan iOS 16 hanya pada iPhone yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir, angkanya tumbuh menjadi 90 persen.

Sebanyak 13 persen dari semua iPhone (dan 8 persen dari yang dirilis dalam empat tahun terakhir) telah menjalankan iOS 15, dan sisanya berjalan di beberapa versi sebelumnya.

Untuk tablet, 71 persen dari semua iPad sudah ada di iPadOS 16, diikuti oleh 20 persen yang menjalankan iPadOS 15.

Untuk iPad yang dirilis dalam empat tahun terakhir, iPadOS 16 mendapatkan 76 persen pangsa pasar lagi diikuti oleh iPadOS 15 dengan 18 persen.

Sebagai perbandingan, angka terbaru dari Google pada bulan April, menunjukkan Android 13 (versi terbaru, diperkenalkan Agustus lalu) baru mencapai 12 persen dari semua perangkat di seluruh dunia.

Untuk diketahui, perangkat lunak iPhone terbaru ini hadir dengan beragam fitur baru yang menjadi kelebihan bagi pengguna yang memakai iOS 16.

1. Bisa edit atau batalkan pesan

iOS 16 datang dengan peningkatan kemampuan pada iMessage. Kini pengguna bisa mengedit pesan pada iMessage.

Pengguna akan diberikan waktu 15 menit untuk mengedit dan dua menit untuk membatalkan pengiriman apapun.

Ketika melakukan pengeditan, Apple akan menampilkan riwayat pengeditan, serta pengguna akan

diberi kesempatan untuk mengedit konten sampai 5 kali.

Selain itu, iMessage juga menghadirkan kemampuan untuk meng-ecek pesan-pesan yang belum terbaca secara lebih mudah.

2. Layar kunci atau lockscreen yang baru

Salah satu fitur baru yang menjadi kelebihan pada iOS 16 yang cukup mencolok adalah hadirnya Layar Kunci baru.

Layar kunci terbaru pada iOS 16 ini menawarkan sejumlah penyesuaian, di antaranya memungkinkan bagi Anda melakukan pengeditan layar kunci.

Anda bisa dengan mudah melakukan penyesuaian font, warna, atau penempatan elemen pada layar terkunci.

Selain itu Anda juga bisa melakukan pengaturan agar subjek foto pada layar kunci terlihat lebih menonjol.

Pengguna iOS 16 kini juga bisa menambahkan widget ke layar terkunci iOS 16 baik widget buatan Apple maupun pihak ketiga.

3. Menyalin teks dalam video

Pada iOS 15 pengguna bisa dengan mudah mengambil informasi berupa teks yang ada pada foto secara langsung.

Kini, pada iOS 16 pengguna juga bisa dengan mudah mendapatkan teks langsung dari dalam video.

Pengguna bisa menyeleksi teks dari dalam sebuah bingkai video yang dijeda kemudian menyalinnya.

Kopi teks tersebut kemudian bisa ditempel di mana pun, seperti untuk keperluan terjemahan atau menyalinnya ke dalam pesan.

4. Penggunaan kunci sandi

Pada iOS 16, dihadirkan kunci sandi sebagai pengganti kata sandi untuk metode masuk.

Kunci sandi ini menggunakan Face ID atau ID wajah maupun ID sentuh yang diharapkan bisa lebih melindungi pengguna dari phishing maupun kebocoran situs web. Dikutip dari Forbes, kunci sandi dienkripsi dari ujung ke ujung dan disinkronkan di seluruh perangkat Apple melalui pengelola kata sandi rantai kunci iCloud.

5. Mode fokus

Dikutip dari Techradar, pada iOS

16, mode fokus telah mendapatkan sejumlah pembaruan. Di antaranya adalah mode fokus kini bisa terhubung ke layar kunci.

Dengan demikian, layar kunci yang ditampilkan bisa secara otomatis dialihkan berdasarkan profil fokus yang Anda miliki.

Sebagai contoh profil fokus "rapat" maka bisa membuat layar kunci mengubah wallpaper yang menawarkan deretan widget terkait detail acara (berbagai sumber)

-
-
-
-
-
-





AKTIVITAS FISIK PENTING AGAR TETAP BUGAR

AKTIVITAS fisik merupakan salah satu hal yang penting agar tubuh tetap fit seiring bertambahnya usia, kata dokter spesialis kedokteran olahraga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr. Antonius Andi Kurniawan, SpKO.

"Meskipun usia tidak lagi muda, jangan sampai aktivitas fisik kita berkurang," kata dokter yang tergabung dalam Perhim

-punan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO).

Andi menuturkan aktivitas fisik harus tetap dibiasakan agar fungsi organ tubuh dan jaringan bisa berfungsi dengan baik.

Ada banyak aktivitas fisik yang bisa dilakukan dengan teratur seperti kombinasi gabungan gerakan fleksibilitas, kardio atau jantung, serta kekuatan otot dan keseimbangan.

Lari, misalnya, dikatakan Andi dapat menjadi salah satu pilihan olahraga yang baik karena memiliki dampak positif bagi kekuatan otot, tulang, dan jantung, mengingat ketiga organ tubuh tersebut diketahui paling sering mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.

"Lakukan rutin aktivitas fisik serta nutrisi tepat untuk jaga kekuatan sinergi antara otot, tulang, serta kesehatan jantung," kata Andi.

Selain aktivitas

fisik, nutrisi juga penting untuk diperhatikan. Dokter spesialis gizi klinis dari FKUI dr. Cut Hafiah, M.Gizi, SpGK, FINEM, AIFO-K mengatakan bahwa nutrisi yang tepat memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan otot, tulang, serta jantung. Terlebih lagi, kata dia, nutrisi bisa membantu memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

"Kondisi tubuh cenderung mengalami penurunan fungsi ketika kita bertambah usia, terutama otot, tulang, dan jantung sehingga pemilihan nutrisi yang tepat sangat penting dilakukan demi menjaga kualitas hidup," ujar Cut Hafiah.

Dia pun menyarankan agar membiasakan mengonsumsi nutrisi yang kadar proteinnya tepat, mengandung kalsium tinggi, serta lemak baik seperti buah zaitun.

"Di dalam ekstrak buah zaitun terdapat hydroxytyrosol yang mampu menjaga kelancaran peredaran darah dan juga kesehatan jantung. Di samping itu imbangi pula dengan pola hidup sehat dan rajin beraktivitas fisik," tutur Cut Hafiah.

Aktivitas itu menjadi ajang berkumpul komunitas sekaligus merayakan semangat

serta bukti bahwa setiap orang bisa tampil aktif, bugar dan produktif meski usia bertambah.

Untuk Kesehatan jantung

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Rio Probo Kaneko Sp.JP, FIHA mengatakan masyarakat perlu melakukan aktivitas fisik maupun olahraga secara rutin karena baik untuk kesehatan jantung.

Dokter yang praktik di RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto, Jawa Tengah itu menambahkan ketika seseorang melakukan aktivitas fisik maka jantung akan meningkatkan jumlah darah yang dipompa setiap menitnya. Aktivitas fisik atau olahraga juga menimbulkan respons adaptasi tubuh, di mana jantung mengalami bertambahnya jumlah tampungan darah pada ruang bilik dan kemampuan kontraksi otot jantung yang makin baik.

Beberapa penelitian juga menunjukkan adaptasi pada jantung tersebut berkaitan dengan peningkatan kesehatan jantung dan penurunan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular. Saat ini pemerintah terus memperkuat gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas guna mencegah berbagai masalah kesehatan, termasuk mencegah penyakit jantung.

"Masyarakat perlu menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, karena memiliki banyak manfaat, termasuk untuk memelihara kondisi kesehatan jantung," katanya (Ant)



Lagi-lagi KPK Tak ... (dari hal 1)

BERBAGAI alasan diungkapkan KPK soal belum ditahannya tersangka korupsi di lingkungan Kemenkeu. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut lembaganya masih terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat bea cukai Andhi Pramono.

Oleh karena itu, lanjut Firli, Andhi sampai dengan saat ini belum ditahan oleh KPK kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Terkait dengan pertanyaan saudara tadi tentang kenapa belum ditahan itu masih dalam proses pengumpulan alat bukti karena sesungguhnya KPK bekerja secara profesional," kata Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Namun demikian, mantan Kabaharkam Polri itu mengatakan bahwa akan segera menyampaikan konstruksi perkara Andhi selengkap-lengkapnya. Teranyar, KPK baru saja menggeledah rumah milik Andhi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (6/6/2023), sebagai bagian dari proses penyidikan.

"Tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di perumahan di Batam, tadi sudah selesai proses penggeledahannya, dan informasi dari teman-teman [penyidik] kemudian diperoleh bukti elektronik yang tentu nanti kami lakukan analisis," terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri secara terpisah, dikutip Rabu (7/6/2023).

Seiring dengan proses penyidikan yang tengah berlangsung, Ali mengatakan bahwa penyidik turut menemukan berbagai aset yang diduga dimiliki Andhi. Namun demikian, aset-aset tersebut akan dikonfirmasi terlebih dahulu terkait dengan kepemilikannya baru kemudian disita sebagai barang bukti.

Sebelumnya, dua rumah milik Andhi di daerah Cibubur dan Jakarta sudah disita oleh lembaga antirasuah. Penyitaan dilakukan dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjeratnya. Namun demikian, penyitaan berbagai aset tersebut tidak hanya bagian dari penyidikan kasus gratifikasi, namun juga akan dikembangkan untuk dugaan pencucian uang. "Tentu sekali lagi kami tidak berhenti pada dugaan gratifikasinya tetapi kami tentu terus dalam dugaan tindak pidana pencucian uangnya," terang Ali.

Seperti diketahui, mantan Kepala Bea Cukai Makassar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK belum mengungkapkan secara utuh konstruksi perkara yang menjerat Andhi. Andhi Pramono disebut terlibat transaksi mencurigakan senilai Rp60.166.172.800.

Sebelumnya, Andhi merupakan satu di antara sejumlah pejabat yang diminta klarifikasi atas laporan harta kekayaannya yang dinilai janggal. Seperti halnya kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun, klarifikasi atas LHKPN Andhi naik ke tahap penindakan hingga ditetapkan tersangka.

Sementara, untuk Sekretaris MA, Hasbi Hasan KPK menyebut,

keputusan belum adanya penahanan adalah bagian dari teknis dan strategi KPK. "Jadi (penahanan Hasbi) hanya soal waktu. Itu bagian dari teknis dan strategi. Tinggal (tunggu) waktu saja," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya.

Alasan faktual tersebut ada tiga, kata dia; kekhawatiran takut tersangka melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti, dan juga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatanya kembali.

Kekhawatiran terhadap tiga hal tersebut tidak terjadi pada Hasbi Hasan maka KPK tak harus melulu melakukan penahanan terhadap seorang tersangka korupsi. "Jika terhadap tersangka tidak ada kekhawatiran tiga hal tersebut penyidik tidak akan melakukan penahanan," pungkasnya.

Hasbi Hasan ditetapkan tersangka baru dalam kasus suap MA bersama pihak swasta bernama Dadan Tri. Ia diduga terkait aliran uang suap sebesar Rp 11,2 miliar di MA dengan perantaranya, Dadan Tri.

Dugaan aliran uang itu disebut dalam persidangan para terdakwa perkara suap MA, Sudrajad dkk.

Kini Hasbi Hasan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Ia juga cuti panjang sebagai Sekma hingga September 2023.

Sebelumnya, Menkopolkum Mahfud MD menyinggung ada pejabat penting MA yang belum ditahan meski sudah berstatus tahanan. Menurut dia, mestinya sudah ditahan untuk menghindari kabur dan hal lain - ia mencontohkan tersangka korupsi ditetapkan tersangka tapi hingga meninggal belum ditahan.

"Lalu di Mahkamah Agung, Saudara, Hakim Agung ditangkap, itu yang bisa ditangkap, ada juga yang sudah jadi tersangka, pejabat penting, tapi belum ditahan," kata Mahfud dalam acara dialog Kebangsaan yang disiarkan melalui kanal YouTube Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

"Kok enggak ditahan ya?" "Ya saya enggak tahu juga karena saya bukan penegak hukum", mestinya ditahan. Tapi hanya diperiksa 'Anda tersangka' lalu disuruh pulang. Ya endak apa-apa, alasan teknisnya kalau dicari-cari ya ada: 'bukhtinya belum cukup'," tambah Mahfud.

Mahfud tak menyebut spesifik

nama yang dimaksud. Namun belakangan ini Sekretaris MA Hasbi Hasan jadi sorotan. Ia sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, bahkan sudah diperiksa sebagai tersangka, tapi tidak ditahan.

Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad mengatakan, KPK seharusnya melakukan penahanan terhadap Hasbi Hasan mengingat ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun penjara.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini, adanya perbedaan perlakuan ini dapat menimbulkan kesan bahwa sekretaris MA yang memiliki kewenangan berbeda dengan Hakim Agung mendapat perlakuan istimewa. "Tentu ini akan menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa tidak ditahan," kata Suparjisingkat.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai tidak ditahannya sekretaris MA Hasbi Hasan membuktikan bahwa KPK semakin lemah. "Saya melihat KPK semakin lemah. Kalau dulu KPK bisa melakukan upaya paksa penahanan dan penangkapan (OTT), tapi sekarang ini saya lihat itu gugur. Padahal KPK pernah bilang, upaya paksa akan dibarengi dengan penahanan," ujar Boyamin.

Dia juga menilai aneh alasan hukum yang dikemukakan oleh KPK bahwa Hasbi Hasan tidak ditahan sepanjang yang bersangkutan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta bersikap kooperatif. Namun perlakuan itu berbeda dengan tersangka hakim agung Sudrajad Dimiyati (SD) di mana pihak penyidik KPK langsung menahan yang bersangkutan usai menjalani pemeriksaan.

"Padahal mereka (Sudrajad Dimiyati-red) lebih kooperatif, panggilan pertama dia langsung datang. Kalau Hasbi Hasan pernah meminta penundaan seminggu. Tapi nyatanya tidak ditahan," sambung Boyamin.

16 Pejabat Kemenkeu Terlibat

Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan 16 pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. Firli menyebut seluruhnya telah diproses KPK.

Awalnya Firli menyebut ada 33 laporan hasil analisis (LHA) ke pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

yang memiliki nilai mencapai Rp 25 miliar. Hal ini dibebaskan Firli saat mengadakan rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Firli menyebut dari 33 LHA itu telah dibagi sesuai pemetaan. Terdapat dua laporan yang tidak terdapat di dalam database KPK, dan ada lima LHA dalam proses penelaahan di Direktorat Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ada 11 laporan, kata dia, masuk ke penyelidikan, sementara 12 lainnya ke tingkat penyidikan. Sedangkan, tiga laporan dilimpahkan ke Mabes Polri.

"Ingin kami sampaikan dari 12 LHA yang telah menjalani proses hukum sebagai berikut: pertama adalah AP (Andhi Pramono) transaksi Rp. 60.166.172.800 sudah tersangka, Eddi Setiadi Rp. 51.800.000.000 sudah terpidana," kata Firli.

"Kami ingin sampaikan dari 16 transaksi tersebut dengan nilai transaksi Rp 8,5 triliun sudah kami tuntaskan. Jadi kami memang tidak banyak bicara mohon izin Pak Johan Budi, kita nggak banyak bicara kita kerja aja Pak, karena kita kerja memang diminta untuk kerja jadi 33 sudah selesai itu Pak," imbuhnya.

Sementara secara umum Firli Bahuri membeberkan kinerja lembaga antirasuah selama Januari hingga Mei 2023. Firli mengatakan, KPK telah menyelidiki 55 berkas perkara dari target 120 perkara selama periode lima bulan tersebut. "Telah dilanjutkan penyidikan sebanyak 73 perkara dari target 120 perkara," kata Firli.

Selain itu, Firli menjelaskan, berkas 39 perkara telah dilimpahkan ke Jaksa. Sementara 67 perkara sudah inkrah dan 62 perkara telah dieksekusi. "Tersangka sampai hari ini sebanyak 73 dan sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 sebanyak 59 perkara," kata Firli.

Sedangkan khusus bulan Juni ini, Firli menambahkan, KPK telah menahan empat orang. "Hari ini ada juga yang kita tahan pak, tiga orang," ujar Firli. Sementara untuk aset yang diselamatkan KPK dari tersangka sepanjang Januari sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp154,10 miliar dari target 141 miliar di tahun 2023. (dya,rls,mer,kum/dya)



Masuk Bursa Cawapres PDIP, Menteri Basuki Enggan Dampingi Ganjar



Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau Rest Area Tol Batang beberapa waktu lalu. Keduanya kini digadang menjadi pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2024. (dok.ist)

JAKARTA-PDIP masih memetakan sejumlah tokoh untuk dipertimbangkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo di 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, muncul usulan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai kandidat cawapres Ganjar karena berhasil membangun infrastruktur dari Aceh hingga Papua.

"Kepada Ketua PKS, Pak [Ahmad] Syaikh, waktu ke rumah bersama Al Muzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia enggak?' 'Enggak' [jawabnya]," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Saya bilang, 'Karena di koalisi Bapak itu ada NasDem, Demokrat, dan PKS, itu banyak calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ajak ke situ, malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu (partai) keluar karena Anda ajak saya, kan rusak,'" imbuhnya.

Jika hubungan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) rusak, ada kemungkinan Anies tak mendapatkan tiket maju di Pilpres 2024. Sehingga Mahfud meminta Syaikh untuk terus menjaga KPP. "Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, 'Jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam, nanti malah pecah karena ada yang tidak setuju dan lain-lain.' Itu tugas saya, jaga pemilu dan demokrasi," tutur Mahfud.

Hingga saat ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebenarnya belum mengumumkan siapa cawapres Anies di Pilpres 2024. Namun Koordinator Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memastikan cawapres yang dipilih Anies akan me-

ngejutkan banyak pihak. "Pasangan ini benar-benar akan mengejutkan koalisi-koalisi dan capres-capres lain. Karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (5/6/2023). "Bisa membawa kemenangan di Pilpres 2024. Sesuai dengan harapan rakyat," imbuhnya.

Ada tiga kandidat cawapres yang sedang ditimbang Koalisi Perubahan yaitu Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher. Selain ketiga tokoh tersebut, PKS pernah mengungkapkan bisa jadi nama cawapres yang dipilih Anies berbeda.

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengakui partainya pernah menawarkan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres pendamping capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Ia membenarkan pernyataan soal tawaran jadi cawapres Anies ini sebagaimana diungkapkan Mahfud kepada media.

Muzammil mengatakan, tawaran itu disampaikan ketika dirinya dan Presiden PKS Ahmad Syaikh bersilaturahmi ke kediaman Mahfud pada 15 April 2023 malam atau 25 Ramadhan 1444 Hijiriah. Dia enggan menjawab ketika ditanya alasan menawarkan Mahfud menjadi cawapres pasangan Anies. "Pertemuan tersebut lebih sebagai silaturahmi tokoh. Tidak spesifik bicara cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Muzammil Senin (5/6/2023).

Dia mengatakan, fokus bahasan dalam pertemuan itu adalah soal bagaimana pemerintah bisa menciptakan suasana kondusif agar Pilpres dan Pemilu 2024 terselenggara

sesuai asas Luber Jurdil. Jangan sampai ada intervensi terhadap partai politik dalam melaksanakan amanat konstitusi, yakni mencalonkan seseorang sebagai capres.

"Tanpa ada intervensi pihak mana pun, termasuk (terhadap) capres Anies Baswedan. Dan Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi dan undang-undang," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Muzammil mengakui, ketika itu Mahfud meminta PKS memastikan Anies Baswedan mendapatkan tiket untuk mendaftar sebagai capres.

Selain soal cawapres dan pencalonan Anies, kata Muzammil, dalam pertemuan itu turut dibahas ihwal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Dibahas pula isu radikalisme yang cenderung bersifat Islamophobia. "Pembicaraan (kami ketika itu) mengalir santai dan informal," ujarnya.

Erick Thohir 'Ditawarkan' ke Prabowo

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku, bahwa nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk ke dalam radar Gerindra untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Muzani mengungkapkan hal itu saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2023) sore.

Diketahui, nama Erick selama ini memang kerap disodorkan PAN sebagai bakal cawapres, ketika bertemu dengan sejumlah partai politik. "Karena itu Erick Thohir sekalipun yang disodorkan PAN untuk jadi cawapres, kami juga ikuti dan amati Pak Erick Thohir. Apakah masuk

radar? Iya," ungkap Muzani.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan PAN memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu. Apalagi, Erick kerap datang ke acara besar PAN. Malahan, belakangan Erick sering tampil dengan kemeja berwarna biru yang selaras seperti warna PAN. "Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir sudah sangat kental," ucap Eddy.

Alasan dukung Erick Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengungkapkan alasan PAN mendorong Erick Thohir maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dia menuturkan, hal itu terlihat dari kinerja Erick yang baru-baru ini mengurus sepak bola Indonesia. "Ya kalau kenapa kan enggak usah ditanya lagi kan. Sudah tahu alasannya kan. Dari sisi bola saja sudah hebat, ya kan?" ujar Yandri saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023) malam.

Selain itu, Yandri menjelaskan, kinerja Erick sebagai Menteri BUMN juga bagus. Lalu, dia menilai Erick adalah sosok muda dan pekerja keras. Yandri menekankan syarat Erick untuk menjadi cawapres sudah cukup. Hanya saja, usulan PAN ini tetap perlu dikomunikasikan dengan partai lain. "Jadi PAN kan tidak ujuk-ujuk mendorong orang, untuk bangsa dan negara," ucapnya. (wid,rls,kum/dya)

PROFIL MENTERI BASUKI HADIMULJONO

Tempat/Tanggal Lahir:

Surakarta, 5 November 1954

Pendidikan

- S1 Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1979)
- S2 dan S3 Teknik Sipil Colorado State University, Amerika Serikat (1989)

Pendidikan

Pimpinan Proyek Induk Pengelolaan Wilayah Sungai (PWS) Ciliwung Cisadene (2000-2001)

Direktur Wilayah Tengah, Ditjen Sumber Daya Air (2001-2002)

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal (2002-2003)

Direktur Jenderal Sumber daya Air (2003-2005)

Pengembangan (2005-2007)

Direktur Jenderal Penatan Ruang (2013-2014)

Menteri PUPR (2014-Sekarang)

